

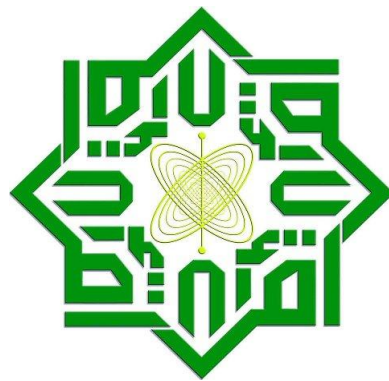
# **SKRIPSI**

## **STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

Pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim



**OLEH:**

**RIYAN YARI HIDAYAT**  
**10975007074**

**PROGRAM S1 ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU  
2012**

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Oleh**  
**Riyan Yari Hidayat**

*Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kuantan Singingi, dengan indikator : pelayanan, keadilan, kepastian dan penegakkan hukum, keterbukaan administrasi perpajakan ,dan ketaatan wajib pajak. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan teori-teori sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian diinterpretasikan terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta diberikan saran. Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah ditambah beberapa Wajib pajak dengan Teknik penarikan sampelnya menggunakan metode sensus dan Random Sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa, observasi, telaah pustaka, kuisisioner dan wawancara. Dari analisa data dapat disimpulkan bahwa strategi peningkatan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu penulis menyarankan agar pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk dapat mempertahankan dan selalu mengedepankan strategi dalam peningkatan penerimaan pajak restoran agar lebih baik dan lebih efektif dalam proses pemungutan sehingga pencapaian target serta realisasinya bisa selalu meningkat.*

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya berupa keimanan, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***“Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kuantan Singingi”***.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat wajib guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan, baik dari segi refrensinya keterbatasan data maupun keterbatas pengetahuan yang dimiliki penulis, tetapi akhirnya semua hambatan itu Alhamdulillah dapat teratasi. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Nazir, MA sebagai Rektor UIN SUSKA RIAU.

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M.Ec sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
3. Bapak Afrizal, S.Sos, M.si sebagai Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan Motivasi dalam penulisan Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya Dosen pada jurusan Administrasi Negara.
6. Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi besera pegawai yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
7. Kepada orang tua ku yaitu Papa dan mama ku tercinta Afrizal.Au dan Syamsiar yang tak pernah letih untuk selalu menjaga, memberi motivasi, spirit baik moril maupun materil.
8. Kepada kakak ku Rizki Yari Amelia,ST dan Adik-adikku Riccy Yari Rahmat dan Ananda Yari Amelia yang sangat kucintai dan kusayang .
9. Special untuk Sussy ibrahim, S.pd yang selalu memberikan semangat dan motivasi moral maupun materil kepada penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-temanku yang paling the best, al-hafizudin, ahmad fahri, itok sawito, siswandi, jeffrizal, kurniadi, saddam, wan aisyah ayu , ayu lestari S.Ap, wirda afni,mustika S.Ap, melliati dan oktavia yenni, S.Ap.

11. Kepada semua teman-teman ku tersayang, Anak- anak Lebay Ana C, yang tidak bisa di sebutkan namanya satu- persatu, terimakasih atas kebersamaan selama ini semoga kita nantinya bisa hidup sukses dan menjadi sahabat untuk selamanya.amin...

12. Kepada Kawan-kawan ANA angkatan 2009, terima kasih karena telah bersedia untuk menjadi teman seperjuangan ku selama ini.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kepada semua pihak, selain “Jazakumullah Kairan Katsiran” semoga Allah SWT memberikan balasan dan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya Rabb...

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Pekanbaru, Februari 2013  
Penulis,

**RIYAN YARI HIDAYAT**  
**10975007074**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1 Otonomi daerah .....	12
2.2 Keuangan Negara dan Daerah .....	14
2.3 Pajak daerah.....	16
2.4 Pengertian pajak.....	19
2.5 Pengertian pajak restoran.....	21
2.6 Pajak menurut syariat islam.....	26
2.7 Pengertian penerimaan.....	28
2.8 Sistem dan penerimaan pajak restoran .....	29
2.9 Cara Pengawasan Penerimaan Pajak Restoran .....	32
2.10 Penelitian Terdahulu.....	35
2.11 Konsep dan teori strategi peningkatan penerimaan pajak .....	37
2.12 Defenisi operasional .....	42
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Waktu dan tempat penelitian.....	44
3.2 Jenis dan sumber data.....	44
3.3 Populasi dan Sampel .....	45
3.4 Teknik Pengmpulan Data .....	47
3.5 Teknik Analisa Data.....	48
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1 Tinjauan umum Kabupaten Kuantan Singingi.....	49
4.2 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing.....	55
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Identitas Responden .....	72
5.1.1 Jenis Kelamin.....	72

5.1.2 Pendidikan Responden .....	73
5.1.3 Usia Responden.....	74
5.2 Strategi Tentang Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran .....	77
5.2.1 Pelayanan Kepada Wajib Pajak.....	77
5.2.2 Keadilan Kepada Wajib Pajak.....	80
5.2.3 Kepastian Dan Penegakan Hukum .....	83
5.2.4 Keterbukaan Administrasi Perpajakan .....	86
5.2.5 Ketaatan Wajib Pajak .....	90
5.2.6 Pencapaian Target dan Realisasi Pajak Restoran .....	93
5.3 Pembahasan.....	95
5.4 Strategi yang Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten - Kuantan Singingi.....	97

## **BAB VI KESIMPULAN**

6.1 Kesimpulan .....	99
6.2 Saran.....	102

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi pajak restoran Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007 - 2011.....	4
Tabel 1.2	Perkembangan pajak dan wajib pajak Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007-2011 .....	5
Tabel 1.3	Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007-2011.....	6
Tabel 1.4	Kontribusi jenis pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007-2011.....	7
Tabel 2.1	Deskripsi dan indikator penelitian....	43
Tabel 3.1	Penetapan Populasi dan Sampel.....	46
Tabel 4.1	Jumlah penduduk masing-masing kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi.....	54
Tabel 4.2	Kondisi kepegawaian Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.....	67
Tabel 4.3	Skema penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kuantan Singingi .....	71
Tabel 5.1	Distribusi Responden berdasarkan jenis kelamin.....	72
Tabel 5.2	Distribusi Responden berdasarkan tingkat pendidikan .....	73
Tabel 5.3	Distribusi Responden berdasarkan tingkat usia.....	74
Tabel 5.4	Distribusi Responden berdasarkan jenis kelamin .....	75
Tabel 5.5	Distribusi Responden berdasarkan tingkat pendidikan .....	75
Tabel 5.6	Distribusi Responden berdasarkan tingkat usia .....	76
Tabel 5.7	Tanggapan Responden tentang faktor pelayanan kepada wajib pajak.....	79
Tabel 5.8	Tanggapan Responden tentang faktor keadilan.....	81
Tabel 5.9	Tanggapan responden tentang faktor kepastian dan penegakkan hukum.....	84



Tabel 5.10	Tanggapan responden tentang faktor keterbukaan administrasi perpajakan.....	88
Tabel 5.11	Tanggapan responden tentang faktor ketaatan wajib pajak.....	91
Tabel 5.12	Tanggapan Responden tentang penerimaan pajak restoran.....	94
Tabel 5.13	Rekapitulasi keseluruhan Quisioner.....	96

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 5.7 faktor pelayanan kepada wajib pajak
- Gambar 5.9 faktor keterbukaan administrasi perpajakan

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga untuk dapat meningkatkan pembangunan atau pemerataan pembangunan suatu daerah, pemerintah kabupaten/kota tidak bisa mengandalkan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Karena itulah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, yang mana kita kenal sebagai otonomi daerah.

Sejak diberlakukannya undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan Daerah yang memegang peranan penting sebagai penggerak atau dana untuk pembangunan. Berdasarkan Undang-undang No.34 Tahun 2000 dan versi terbaru Undang-undang No 28 Tahun 2009, pajak Daerah adalah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk dipergunakan membiayai peyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Hal ini pada gilirannya akan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Daerah melalui pemanfaatan sumber daya dan potensi masing-masing Daerah. Untuk mengembangkan dan memotivasi sumber keuangan Daerah, pemerintahan Daerah diberi peluang menggali sumber-sumber pendapatan yang cukup potensial seperti pajak dan

retribusi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

Oleh karena itu Pajak Daerah seperti Pajak Kabupaten atau Kota sangat berperan penting untuk membantu lancarnya jalan roda pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dimaklumi karena sumber penerimaan terbesar APBN atau APBD saat ini berasal dari sektor pajak. untuk mendukung perannya yang begitu besar, masyarakat di Daerah diharapkan lebih peduli dan pengetahuan masyarakat harus ditingkatkan sehingga bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan Daerah.

Jadi dengan demikian, pajak merupakan pungutan daerah yang penerimaannya harus ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan daerah seperti yang dikehendaki masyarakat daerah, karena seluruh rangkaian kegiatan pemerintah dan pembangunan memerlukan dana atau biaya yang sangat besar, dan ini tidak akan terwujud jika pemerintah daerah tidak bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerahnya.

Begitu juga daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan daerah otonomi seperti daerah otonomi lainnya yang ada di Indonesia bahwa untuk membiayai pengeluaran daerah, baik yang berupa pembiayaan rutin maupun pembangunan pastilah memerlukan dana yang begitu besar karena itu dinas pendapatan daerah selaku unsur pelaksana daerah diharuskan mampu menggali potensi-potensi pendapatan daerah dan usaha daerah lainnya secara optimal.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan ada beberapa pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, diantaranya :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak air tanah
8. Pajak bea perolehan atas tanah
9. Pajak parkir
10. Pajak sarang burung walet

Keseluruhan penerimaan pajak daerah seperti yang diatas memiliki peranan yang sangat penting bagi pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi, penerimaan atau pemungutan tersebut merupakan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga diharapkan setiap kecamatan dan instansi mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk peningkatan penerimaan daerah, salah satunya pajak restoran.

Menurut Yani Ahmad (2002 : 48) Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan Restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman

yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Pajak Restoran termasuk Pajak Kabupaten atau Kota, yang tarif jenis pajaknya sebesar 10%(sepuluh persen) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Daerah, karena dari berbagai pajak yang ada di Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang selalu meningkat, ini didasarkan karena jumlah pendapatan asli Daerah yang berasal dari pajak restoran sangat baik.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berupaya meningkatkan pengelolaan pajak daerah dan mengoptimalkan penerimaan dengan memberikan sanksi administratif dan denda bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak dari berbagai sektor pajak, termasuk pajak restoran agar setiap tahun mengalami peningkatan. Adapun jumlah penerimaan dari pajak restoran di Kabupaten Kuantan Singingi lima tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel I.1**  
**Realisasi Pajak Restoran**  
**Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007-2011**  
**Periode 31 Desember**

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2007	350.000.000,00	652.583.635,00	186,45
2008	370.000.000,00	896.459.659,00	242,29
2009	700.000.000,00	933.480.341,00	133,35
2010	730.000.000,00	803.965.624,00	110,13
2011	803.000.000,00	973.455.663,00	121,23

*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing*

Berdasarkan Tabel I.1, Realisasi Pajak Restoran dari tahun ketahun terus meningkat dari target yang telah ditetapkan, yakni target sebesar Rp.350.000.000,00 pada tahun 2007 dan penerimaan dari sektor pajak restoran

pada tahun ini yang terealisasi sebesar Rp.652.000.000,00 atau sebesar 186,45%.dan pada tahun 2008 dengan target Rp.370.000.000,00mencapai realisasi sebesar Rp.896.459.659,00 atau 242,29%. dan hasil dari tahun 2009 mencapai Rp.933.480.341 atau 133,35% dari target sebesar Rp.700.000.000,00, realisasi tahun 2010 sebesar Rp.803.965.624 atau 110,13% dari target sebesar 730.000.000,00, realisasi tahun 2011 sebesar Rp.973.455.663 atau 121,23% dengan target sebesar Rp.803.000.000,00.

Meningkatnya jumlah Penerimaan Kabupaten Kuantan Singingi dari sektor pajak restoran dari tahun ke tahun, bahkan melebihi target yang ditetapkan disebabkan karena perkembangan jumlah wajib pajak restoran terus meningkat, seperti yang digambarkan pada Tabel dibawah ini.

**Tabel I.2**

**Perkembangan Pajak dan Wajib Pajak Restoran**

**Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007-2011**

Tahun	Jumlah WP / WR	Pajak Restoran (Rp)
2007	208	652.583.635,00
2008	210	896.459.659,00
2009	272	933.480.341,00
2010	307	803.965.624,00
2011	314	973.455.663.00

*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing*

Berdasarkan Tabel I.2, Terlihat bahwa Perkembangan Pajak dan Wajib Pajak Restoran Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2007-2008 mengalami peningkatan 2 jumlah wajib pajak.dan pada tahun 2008-2009 juga mengalami peningkatan sebesar sebesar 62 jumlah wajib pajak dan pada tahun 2009-2010

juga mengalami peningkatan sebesar 35 wajib pajak dan pada tahun 2010-2011 terjadi peningkatan sebesar 7 wajib pajak.

Selain itu Pajak Restoran memberikan peranan yang cukup berarti bagi sektor PAD maupun sektor Pajak Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini tergambar dalam kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

**Tabel I.3**  
**Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah**  
**Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007-2011 (Dalam Rupiah)**

Tahun	Pajak Restoran	PAD	Kontribusi
2007	652.583.635,00	24.280.667.075,07	2,7%
2008	896.459.659,00	25.380.245.966,18	3,6%
2009	933.480.341,00	23.147.073.224,50	4,0%
2010	803.965.624,00	22.435.798.449,76	3,6%
2011	973.455.663,00	23.755.740.032,02	4,0%

*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing*

Berdasarkan Tabel I.3, terlihat bahwa kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi selama kurun waktu lima tahun terakhir dengan rata-rata 3,58%. Dapat terlihat dari tabel diatas, kontribusi dari sektor Pajak Restoran dari tahun ketahun selalu mengalami perubahan dalam artian kata selalu meningkat. Pajak Restoran dalam penerimaan daerah ini memberikan kontribusi yang baik pada setiap tahunnya.

Dimana tahun 2007 pajak restoran berkontribusi membangun PAD sebesar 652.583.635,00 atau sebesar 2,7%. Pada tahun 2008 Pajak Restoran berkontribusi mambangun jumlah PAD sebesar Rp. 896.459.659,00 atau sebesar 3,6%. Tahun 2009 Pajak Restoran berkontribusi membangun jumlah PAD mengalami peningkatan sebesar Rp. 933.480.341,00 atau 4,0% . Di tahun 2010 kontribusi



Pajak Restoran dalam membangun PAD dengan jumlah Rp. 803.965.624,00 atau 3,6%. Untuk tahun 2011 Pajak Restoran berkontribusi sangat baik dengan jumlah sebesar Rp. 973.455.663,00 atau sebesar 4,0% dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) .

Dan dari semua jenis pajak yang dipungut di kabupaten Kuantan Singingi yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak restoran menempati urutan pertama sebagai penyumbang terbesar PAD di Kabupaten Kuantan Singingi, yang dapat dilihat pada ditabel dibawah ini :

**Tabel 1.4**  
**Kontribusi Jenis Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah**  
**Kabupaten Kuantan Singingi (Dalam Rupiah)**

Jenis Pajak	Realisasi (Rp)	PAD	Kontribusi
Pajak Hotel	184.715.000,00	23.755.740.032,02	0,77%
Pajak Restoran	973.455.663,00	23.755.740.032,02	4,09%
Pajak Hiburan	75.750.000,00	23.755.740.032,02	0,31%
Pajak Reklame	300.860.625,00	23.755.740.032,02	1,26%
Pajak Parkir	65.700.000,00	23.755.740.032,02	0,28%
Pajak mineral bukan logam dan batuan	61.930.829,30	23.755.740.032,02	0,26%

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011*

Berdasarkan tabel 1.4, Terlihat bahwa dari jenis masing-masing pajak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana Pajak restoran memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 4,09% dan di susul oleh pajak reklame ditempat kedua dengan kontribusi sebesar 1,26%. Sedangkan yang paling sedikit memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 0,26%.

Keberhasilan pemungutan seperti yang telah digambarkan oleh tabel-tabel seperti yang diatas ditentukan oleh dua hal yaitu: kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu pemerintah daerah dalam hal ini Dispenda Kabupaten Kuantan Singingi mengambil strategi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dari sektor pajak restoran dengan cara sebagai berikut :

1. Dengan cara melakukan pengawasan terhadap restoran yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi patuh atau tidak sebagai wajib pajak.
2. Menyempurnakan sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga kinerja aparatur pajak semakin baik.
3. Melakukan penyuluhan atau pendataan langsung kelapangan terhadap restoran-restoran yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengerti arti pentingnya pajak dan retribusi bagi pembangunan daerah.
5. Memberikan selebaran-selebaran kepada masyarakat yang sering makan/minum kerestoran atau memberitahukan kepada pengunjung bahwasannya restoran tersebut sudah dikenakan pajak dengan tarif 10% .
6. Meningkatkan disiplin kerja pegawai yang tinggi .

Dari keterangan di atas dan kondisi yang telah penulis paparkan menunjukan bahwa Pendapatan Daerah dari sektor pajak restoran sangat berkontribusi nyata untuk peningkatan pembangunan di segala bidang, sehingga berdasarkan uraian di atas penulis mengangkat judul **“Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten Kuantan Singingi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan pokok permasalahannya dalam penelitian ini sebagai berikut: **“Bagaimanakah strategi peningkatan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kuantan Singingi?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Untuk memberikan informasi strategi apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran.
2. Untuk memberikan informasi mengenai pelayanan administrasi pembayaran pajak restoran.
3. Untuk memberikan informasi tercapainya target penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Menambah pengetahuan bagi penulis sehingga menjadi pengalaman yang bermanfaat di kemudian hari.
5. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial khususnya jurusan Administrasi Negara.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Muatan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini merupakan pendahuluan dimana dikemukakan hal-hal mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Merupakan bab yang berisikan tentang beberapa teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai pengertian atau definisi pajak, teori strategi peningkatan penerimaan pajak restoran, definisi atau konsep, dan definisi operasional.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini digunakan untuk menguraikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan diakhiri dengan analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang gambaran umum objek yang akan diteliti, seperti sejarah Dinas Pendapatan Daerah, kewenangan serta tugas pokok dan fungsi, serta Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

## **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi kedepannya.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Otonomi Daerah**

Sistem pemerintahan Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuklah daerah otonomi yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota. Menurut pasal 1 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang pemerintahan daerah mendefinisikan Otonomi Daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan “daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sedangkan Sumaryadi (2005: 48) mengatakan Otonomi Daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang

berwenang dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menurut Widjaja (2009:76-77) menjelaskan Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekosentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan daerah.

Dengan demikian, dampak pemberian otonomi daerah ini tidak terjadi pada organisasi/administrative lembaga pemerintah daerah saja, akan tetapi berlaku juga pada masyarakat (publik). Yaitu, peranan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah akan semakin besar dan menentukan. Jadi melalui

otonomi, pemerintah daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendorong dan memberikan motivasi untuk membangun daerah, sehingga akan muncul kreasi dan inovasi masyarakat yang ingin bersaing dengan daerah lainnya untuk memajukan daerah dan meningkatkan pembangunan daerah.

## **2.2 Keuangan Negara dan Daerah**

Studi Keuangan Negara pada hakekatnya merupakan kajian terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sektor publik atau negara dalam pengelolaan anggarannya. Hal ini berbeda dengan keuangan dunia bisnis, perbedaan ini pada dasarnya terletak pada :

- a. Motif rumah tangga negara tidak mencari keuntungan, melainkan pelayanan masyarakat, sedangkan rumah tangga bisnis selalu mengutamakan keuntungan.
- b. Pengelolaan Keuangan Negara dapat diselenggarakan dengan menggunakan kekuasaan (power) seperti pungutan paksa yang berupa pajak, suatu hal yang tidak dimiliki swasta.
- c. Negara menempatkan orientasi utamanya pada belanja negara disusul upaya pemasukkan dana untuk menutupnya, sedangkan orientasi rumah tangga swasta berdasar pada pendapatan baru mengatur belanjanya.
- d. Rumah Tangga Negara berkaitan dengan aspek makro yang lebih luas dibandingkan rumah tangga swasta yang bersifat mikro.

Menurut Sutrisno PH (dalam Afrizal 2009: 2) Ilmu Keuangan Negara adalah ilmu yang mempelajari atau menelaah tentang pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah/negara.



Seperti halnya pemerintah pusat, pengelolaan keuangan daerah juga menggunakan pembagian fungsi yang tidak berbeda. Gubernur/Bupati/Walikota akan memiliki fungsi sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah atau CEO, dinas-dinas sebagai COO, dan pengelola keuangan daerah sebagai CFO.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa ” Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut” (dalam Afrizal 2009: 4).

Menurut C.S.T. Kansil (2006 : 786) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah ditentukan oleh adanya sumber pendapatan daerah yaitu berupa pajak dan retribusi dan pendapatan asli

daerah yang sah. Jadi, setiap daerah harus mampu menggali potensi pendapatan daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahannya.

### **2.3 Pajak daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah atau pembangunan daerah (setiawan,agus,2006:349).

Pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah kekuasaannya yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah berhubungan dengan tugas dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (afrizal,2009:48).

Menurut Mardiasmo, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (2008:98-99).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Jenis-jenis Pajak Daerah:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

1. Pajak Kendaraan Bermotor

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  4. Pajak Air Permukaan dan
  5. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
1. Pajak Hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  7. Pajak Parkir
  8. Pajak Air Tanah
  9. Pajak Sarang Burung Walet
  10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan
  11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Finansial (Budgeter)

Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja Negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat.

Dengan demikian, fungsi financialnya yaitu pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah (apa lagi untuk saat ini, pajak sumber dana bagi pemerintah yang paling utama, dikarenakan mulai berkurangnya sumber dana lainnya yang dimiliki pemerintah, misalnya: minyak dan gas bumi) guna mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan Negara.

## 2. Fungsi mengatur (Regulerend)

Fungsi mengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Terutama dalam menyusun undang-undang pajak senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan menimbulkan interpretasi yang berbeda, antara fiskus dan wajib pajak.

Jika dilihat dari konsep pajak, maka pajak biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Sementara itu, dapat dilihat pada pasal 2 ayat 4 undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa dengan peraturan daerah dapat diterapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan dalam (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. bersifat pajak dan bukan retribusi
2. objek pajak terletak atau terdapat diwilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat daerah kabupaten/kota yang bersangkutan

3. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
4. objek pajak bukan merupakan objek propinsi dan atau objek pajak pusat
5. potensinya memadai
6. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
7. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
8. menjaga kelestarian lingkungan

## 2.4 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dapat dipaksakan yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung yang dapat ditujukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Prof. Dr. PJA. Andiani).

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang berlangsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi ini kemudian lebih disempurnakan, menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "*surplus*"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (2009:1).

Menurut Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian,

dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (2009:1).

Menurut Fledman pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (2009:1).

Menurut Siti Resmi, terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Fungsi *regularend* artinya pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (2009:3).

Salah satu contoh penerapan pajak sebagai fungsi *regularend* (pengatur) adalah tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, yang disebut wajib pajak.

Menurut Siti Resmi, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (2009:21).

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai bahwa: pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pajak diperuntukan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*. Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, pajak negara dan pajak daerah.

## **2.5 Pengertian Pajak Restoran**

Menurut Siahaan P Marihot (2005 : 271) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

Menurut Yani Ahmad (2002 : 48) Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan Restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Pemungutan pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 (2011 : 25) Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

Menurut **peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 tahun 2011 tentang pajak restoran** yakni:

1. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran
2. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering.
3. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
4. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
5. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Menurut Siahaan P Marihot (2005 : 272-273) Dalam pungutan Pajak Restoran terdapat beberapa Terminologi yaitu:



1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga, dan katering.
2. Pengusaha Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan Perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang Rumah makan.
3. Pembayaran adalah Jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.

#### **2.5.1 Objek ,Subjek, dan wajib Pajak Restoran**

##### **1. Subjek Pajak Restoran**

Menurut Siahaan P. Marihot (2005 : 274) Yang menjadi Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada Restoran.

##### **2. Wajib Pajak Restoran**

Menurut Siahaan P. Marihot (2005 : 274) Yang menjadi Wajib Pajaknya adalah Pengusaha Restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang Rumah Makan.

##### **1. Objek Pajak Restoran**

Menurut Siahaan P. Marihot (2005 : 273) Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan Restoran dengan Pembayaran. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah Rumah Makan, Cafe, Bar, dan sejenisnya.

Pelayanan Restoran meliputi penjualan makanan dan minuman di Restoran, termasuk penjualan makanan atau minuman yang diantar atau dibawa pulang.

## 2. Bukan Objek Pajak Restoran

Menurut Siahaan P. Marihot (2005 : 273) Pada Pajak Restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh Restoran atau Rumah Makan dikenakan Pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk Objek Pajak, yaitu:

1. Pelayanan usaha Jasa Boga atau Katering
2. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran atau Rumah Makan

yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Daerah, Misalnya saja tidak melebihi Rp. 30.000.000,00 per Tahun.

### **2.5.2 Dasar Pengenaan dan Tarif,dan cara perhitungan Pajak Restoran**

#### 1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut Siahaan P. Marihot (2005 : 275) Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, berada dibawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

#### 2. Tarif Pajak Restoran

Menurut Siahaan P. Marihot (2005 : 276) Perhitungan Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sepuluh persen (10%) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keluasaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen (10%) .

### 3. Perhitungan Pajak Restoran

Menurut Siahaan P. Marihot (2005 : 276) Besarnya pokok Pajak Restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut :

Rumus Perhitngan Pajak Restoran

Pajak terhutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran .

Menurut Siahaan P. Marihot (2005 : 272-273) Dasar Hukum Pungutan Pajak Restoran pada suatu Kabupaten atau Kota adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak restoran. yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran atas perubahan Nomor 04 Tahun 2001 .

## 2.6 Pajak Menurut Syari'at Islam

Pajak dalam pandangan islam sebagai mana dalam firman allah dalam surat at-Taubah ayat 29

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا  
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*

Pajak dalam islam disebut dengan jizyah yaitu per kepala yang dipungut oleh per kepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Jizyah pungutan dapat dipaksakan dimana dalam ayat diatas oleh diperangi bagi yang tidak mau

membayar jizrah. Sebagaimana pajak dapat dipaksakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika pajak dipungut menurut secara islam bagi yang enggan membayar pajak dapat ditagih secara paksa, sita dan bahkan boleh diperangi sehingga wajib pajak tersebut tunduk terhadap aturan yang telah di keluarkan.

Berdasarkan defenisi pajak, maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut :

1. pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan kekuatan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah berdasarkan jenis pajak yang dipungut.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah ( tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak ).
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari Negara ke pada pembayar pajak.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
6. Pajak memiliki sifat yang dapat dipaksakan. Artinya wajib membayar pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2.7 Pengertian Penerimaan**

Penerimaan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penjualan sejumlah output dengan kata lain merupakan segala pendapatan yang diperoleh perusahaan hasil dari penjualan produksinya.

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah (afrizal,2009:47). penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan.

Pendapatan daerah menurut pasal 5 ayat 2 undang-undang Nomor 33 tahun 2004 bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan

Pembiayaan menurut pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
2. Penerimaan pinjaman daerah
3. Dana cadangan daerah
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Selain itu penerimaan adalah suatu hasil yang dicapai pemerintah daerah dalam hal ini pajak restoran dari pengusaha atau pemilik restoran yang oleh Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.

## 2.8 Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Restoran

Sistem adalah seperangkat komponen yang terikat secara fungsional satu dengan lainnya dan mempunyai tujuan. Sedangkan prosedur merupakan rangkaian dari awal hingga akhir yang tidak dapat dirubah susunan kegiatannya. Pada hakikatnya prosedur terjadi pada sebuah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan memerlukan aturan atau tuntunan yang harus dilalui, tanpa adanya satu tahap pun yang terlupakan atau tertinggal prosedurnya.

Adapun sistem dan prosedur penerimaan pajak restoran di kabupaten kuantan singingi menurut **Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011** adalah:

### 1. Pendaftaran dan Pendataan

Untuk mengetahui jumlah potensi pajak dan mendapatkan data wajib pajak, Dinas Pendapatan dan SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang pajak restoran melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap jumlah wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk

Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

## 2. Perhitungan dan Penetapan

Setiap pengusaha restoran (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak restoran yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak restoran pada dasarnya merupakan sistem self assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

## 3. Pembukuan dan Pelaporan

Wajib pajak restoran yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan yang diatur dengan peraturan bupati, yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan, harga jual, dan harga pergantian dari penjualan makanan dan atau minuman. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.



#### 4. Pembayaran dan Penagihan/pemungutan

Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Tetapi harus diingat bahwa untuk terkoordinirnya penerimaan pajak restoran sangat diperlukan Partisipasi wajib pajak yang mempengaruhi seberapa banyak wajib pajak memberikan kontribusi terhadap target dan realisasi penerimaan pajak restoran dan suatu Kualitas kerja didalam suatu organisasi yaitu Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi karena aktivitas tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kualitas atau kinerja yang baik dari pegawai dalam organisasi dan organisasi merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan.

Pernyataan ini sangat logis karena apabila dikaitkan dengan peranan Dinas Pendapatan Daerah, selaku unsur pelaksana dibidang pendapatan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan pajak daerah yang meliputi fungsi pemungutan, koordinasi, dan pembinaan teknis pajak dan retribusi daerah bahwa rangkaian pengelolaan organisasi akan menjadi fungsi keberhasilan tujuan yang diharapkan.

Sehubung dengan penerimaan pendapatan pajak daerah sektor pajak restoran yang telah diberlakukan/ditetapkan paling tinggi sebesar 10% berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011, maka keberhasilan pencapaian target tidak terletak ditangan Kepala Dinas Pendapatan semata melainkan rangkaian kerja sama seluruh unit kerja yang ada dengan melaksanakan sistem kerja yang telah dilaksanakan secara optimal. Selain itu, keberhasilan pemungutan dalam sektor pajak restoran bahkan melebihi target yang telah ditetapkan di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi ditentukan oeh dua hal yaitu: kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya.

## **2.9 Cara Pengawasan Penerimaan Pajak Restoran**

Dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran, tentunya ada peran-peran penting yang dilakukan pemerintah atau dalam hal ini Dipenda untuk melakukan pengawasan penerimaan pajak restoran. Pentingnya pengawasan dikarenakan untuk mencegah praktik-praktik curang yang dilakukan pengusaha restoran dalam membayar pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan, dan juga untuk peningkatan penerimaan pajak restoran. Pengawasan akan berjalan efektif jika didukung oleh peraturan daerah dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemerintah serta ditaati oleh masyarakat daerah.

Adapun cara yang dilakukan Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengawasi penerimaan pajak restoran antara lain:

1. Dinas Pendapatan menetapkan Peraturan Daerah yang dimana semua pengusaha restoran yang terdata wajib membayar tarif pajak

sebesar 10% yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk mengetahui dan mendapatkan data wajib pajak tersebut, Dinas Pendapatan melakukan pendaftaran dan pendataan, kegiatan ini diawali dengan memberikan formulir atau blanko SPTPD ( surat pemberitahuan pajak daerah ) untuk diisi wajib pajak dengan sistem self assesment atau wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Jadi dengan cara pendataan tersebut semua wajib pajak bisa terdata dan dikenakan secara merata.

2. Sebelum formulir atau blanko SPTPD diisi atau dikembalikan, Dinas Pendapatan menyebarkan surat edaran kepada setiap wajib pajak dari Bupati yang berisi pemberitahuan untuk mengisi formulir isian dengan data yang sebenarnya, jika itu tidak dilakukan maka akan dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan pasal 174 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- a. Wajib pajak yang terkena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

- b. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar.
3. cara ketiga dalam pengawasan penerimaan pajak restoran yang dilakukan Dinas Pendapatan adalah, setelah blanko atau formulir SPTPD diisi dan dikembalikan, maka Dinas Pendapatan akan menerbitkan atau memberikan kartu kontrol atau kartu kendali sebagai bukti tanda pembayaran sehingga dengan kartu kontrol ini, semua wajib pajak bisa diawasi dengan mudah. Dengan kartu kontrol atau kartu kendali serta dengan membaca surat edaran dari bupati maka wajib pajak yang ingin berbuat curang atau membayar pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan yang di dapatkan maka wajib pajak tersebut akan berpikir dua kali jika tidak ingin dipenjara atau dikenakan denda.
4. Cara keempat dalam pengawasan penerimaan pajak restoran yang dilakukan Dinas Pendapatan adalah, melakukan isidentil atau mengecek langsung kerumah-rumah makan yang ada tentang benar atau tidaknya penghasilan yang mereka dapatkan, jika ada pemilik restoran yang kedapatan menyeter tidak sesuai dengan pendapatan

yang diperoleh, maka restoran tersebut akan dikenakan denda sampai 4 kali lipat dari pembayaran yang seharusnya, atau bahkan dengan dipidana penjara. Jadi, dengan pengawasan tersebut akan membuat efek jera dan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya.

Dengan cara-cara pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah tersebut, maka akan tercapai keberhasilan pemungutan dalam sektor pajak restoran dan menjadi fungsi keberhasilan tujuan yang diharapkan.

## **2.10 Penelitian Terdahulu**

Dari penelitian terdahulu yang diambil dari skripsi guntur alamsyah (2007), yang berjudul “Analisis Pemungutan Pajak Restoran Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir” dapat diambil kesimpulan:

1. Proses pendaftaran dan pendataan yang belum berjalan secara maksimal, dimana proses pendaftaran dan pendataan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlakutetapi tidak sesuai dengan data yang sebenarnya atau yang dilaporkan oleh wajib pajak ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan adanya wajib pajak yang sudah melaporkan usahanya tapi tidak didaftarkan.
2. Proses pemungutan/penagihan yang belum sesuai dengan aturan pemungutan yang sebenarnya dari Dinas Pendapatan, hal ini dikarenakan adanya pemungut/kolektor yang tidak berwenang yang

bukan berasal dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Pembukuan dan pelaporan yang belum efektif, artinya petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir hanya melakukan pencatatan data wajib pajak restoran yang ada tetapi tidak dimasukkan kedalam buku pajaknya serta laporan yang dibuat tidak teratur.
4. Adanya sumber daya manusia/tingkat pendidikan yang belum setara pada pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dimana pegawai sudah melaksanakan tugas namun tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sedangkan dari jurnal Roni Ekha Putra (2009), disimpulkan bahwa Dispenda Kota Bukit Tinggi memiliki kinerja yang cukup baik dalam menggali potensi penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran ini terbukti dari kemampuan Dispenda mencapai target realisasi dan bahkan cenderung melebihi target karena beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dispenda Kota Bukit Tinggi dalam menggali potensi pajak hotel dan restoran ini yaitu sumber daya manusia yang dimiliki wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, ketegasan kebijakan atau aturan pajak serta kondisi sosial ekonomi daerah.

Namun dari keberhasilan tersebut Dispenda masih menyadari bahwa potensi ini belum tergali secara optimal karena diperkirakan masih bisa ditngkatkan penerimaan pajak ini dengan syarat adanya kepatuhan dari wajib

pajak yang menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran. Karenan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia menggunakan sistem *self assesment*, sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang. Dari kendala yang dihadapi ini seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini Dispenda harus melakukan sosialisasi yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

## **2.11 Konsep dan Teori Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran**

Menurut Tedjo Tripono dan Udan (2005: 17) Strategi adalah rencana atau pilihan tentang apa yang hendak dicapai menjadi apa suatu organisasi dimasa depan (arah) dan bagaimana mencapai keadaan yang diinginkan.

Menurut Sony Agustinus, Strategi perpajakan merupakan upaya atau cara yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. Strategi perpajakan ini harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan juga harus sesuai dengan kebutuhan wajib pajak (2009:3).

Menurut peraturan daerah nomor 3 tahun 2011, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran sangat berkontribusi nyata bagi penerimaan pendapatan daerah untuk pembangunan daerah. Adapun pendapatan daerah merupakan salah satu pos dalam neraca anggaran pendapatan dan belanja daerah yang menunjukkan nilai pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah. Nilai pendapatan daerah menunjukkan kinerja dari daerah tersebut selama kurun waktu tertentu biasanya satu tahun dilihat dari

pengumpulan dana untuk membiayai pembangunan di daerah. Oleh karena itulah diperlukan suatu strategi atau cara untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Menurut fakih mendefenisikan strategi sebagai upaya yang disiplin untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan itu (2005:4). Dalam proses perencanaan strategi harus meliputi komponen-komponen dasar yang terdiri dari:

- a. Menekankan pemikiran strategi yang dikembangkan dengan target-target kedepan.
- b. Analisa pernyataan visi dan tujuan umum, dirumuskan oleh pimpinan dengan lingkungan, menilai dan mengidentifikasi faktor-faktor eksternal dan kondisi yang harus diperhitungkan untuk bahan memformulasikan strategi organisasi.
- c. Memeriksa keadaan dan sumber daya internal dengan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi.
- d. Memformulasikan, mengevaluasi, dan menyelesaikan strategi.

Menurut Mohammad Zain, dalam mengelola perpajakan ada empat hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Pemahaman mengenai masalah perpajakan hendaknya jangan dibatasi kepada pemahaman undang-undang pajak saja, tetapi juga harus meliputi peraturan pemerintah (pp), keputusan presiden (kepres), surat keputusan menteri keuangan, surat keputusan surat edaran direktur jenderal pajak.



2. Persoalan perpajakan adalah persoalan perundang-undangan, sehingga hanyalah otoritas legal yang berwenang memutuskan apa yang benar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
3. Menyangkut bahasa yang digunakan dalam surat keputusan atau surat edaran yang merupakan interpretasi resmi undang-undang pajak atau semacam petunjuk pelaksanaannya.
4. Teknik strategi penghindaran pajak merupakan kombinasi antara kepentingan bisnis dan strategi penghindaran pajak yang menguntungkan kedua belah pihak.

Selain itu, Dalam Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang. Di jelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan indonesia.

Dalam Buku Saku Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2008, terdapat beberapa cara atau strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan peningkatan penerimaan pajak antara lain untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, keadilan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakkan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi

perpajakan dan ketaatan wajib pajak yang pada akhirnya bisa menjadi strategi untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

A. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Keberhasilan dalam mengelola keuangan daerah tidak pernah terlepas dari kemampuan dan pengetahuan dari pengelolanya. Jika Kualitas sumber daya manusia aparatur pajak yang kurang merata dan terbatasnya tenaga operasional, juga menjadi kendala kelancaran dalam pemberian pelayanan kepada para wajib pajak.

Sedangkan kelemahan sistem perpajakan yang umumnya terjadi biasanya ditandai dengan prosedur yang telah usang, pegawai yang dibayar rendah, pegawai yang kurang terlatih, sistem perpajakan yang terlalu kompleks sehingga sulit untuk mencapai efensiensi administrasi dengan sumber daya yang tersedia yang sangat minim bagi kantor pelayanan pajak.

B. Keadilan bagi wajib pajak

Menurut Adam Smith dalam buku *an inquiry into the nature and cause of the wealth of nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima (dalam Afrizal 2009: 26).

### C. Meningkatkan Kepastian dan Penegakkan hukum

Penegakkan sanksi merupakan salah satu upaya penerapan hukum yang tegas dan adil terhadap masyarakat, agar mereka memenuhi peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tujuan pengetatan sanksi sebagai upaya menyadarkan masyarakat untuk membayar kewajibannya secara tepat waktu guna mencapai target penerimaan pendapatan asli daerah.

sanksi mempunyai dua tujuan, yaitu pertama adalah menghalangi orang untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan, kedua adalah menegakkan keadilan. Jika orang yang patuh dan tidak patuh mendapat perlakuan yang sama, orang yang patuh bisa saja berubah pendirian dan mencoba melakukan hal yang sama.

Dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, seseorang dipengaruhi oleh berbagai motif. Kelman menguraikan bahwa salah satu motif orang membayar pajak adalah karena didorong oleh suatu ketakutan akan mendapatkan hukuman bila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### D. Meningkatkan Keterbukaan Administrasi Perpajakan

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya keberhasilan dalam penerimaan pajak daerah sangat ditunjang oleh pelaksanaan administrasi pendapatan daerah yang baik dan efisien. Administrasi merupakan peran penting dalam menentukan sistem pendapatan asli daerah, administrasi dituntut untuk mampu memenuhi target penerimaan pendapatan asli

daerah yang berkelanjutan dan tuntunan reformasi yang berkembang pada masyarakat.

#### E. Ketaatan Wajib Pajak

Ketaatan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak daerah yang merupakan hal pokok dalam pendapatan asli daerah tidak bisa terlahir dengan sendirinya tanpa adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dan kontrol dari pemerintah itu sendiri.

### **2.12 Defeiniisi Operasional**

Menurut singarimbun (2005: 46) defenisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, defenisi operasional berisikan tentang indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel dari dalam penelitian ini, adapun operasionalisasi variabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1 deskripsi dan indikator Penelitian.**

Variabel Penelitian	Indikator	Item penilaian / sub indikator
Strategi peningkatan penerimaan pajak restoran di kabupaten kuantan singingi	pelayanan	Pelayanan prima yang diberikan kepada wajib pajak
		Kemampuan dan pengetahuan pemungut pajak
	Keadilan	Pemungutan pajak harus adil dan merata
	Kepastian dan penegakkan hukum	Memberi sanksi kepada pengusaha restoran yang menunggak pembayaran.
		Memberi sanksi kepada petugas yang tidak optimal dalam melakukan pemungutan pajak.
	Keterbukaan administrasi perpajakan	Sistem pencatatan data para wajib pajak yang mudah dihitung dan sederhana
		Pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak restoran
	Ketaatan wajib pajak	Sosialisasi dan informasi yang diberikan petugas dilapangan
	Pencapaian target dan realisasi	Memaksimalkan kinerja tempat pembayaran pajak restoran Yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Tempat Penelitian**

Tempat pelaksanaan Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) yang bertempat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini karena organisasi ini merupakan organisasi yang mengurus pengelolaan dan penerimaan Pajak, termasuk juga Pajak Restoran. Penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, penelitian ini mencakup:
  - a. Sistem dan prosedur penerimaan Pajak Restoran yaitu :
    1. Pendaftaran dan pendataan.
    2. Perhitungan dan penetapan.
    3. Pembukuan dan pelaporan.
    4. Pembayaran dan pemungutan.
  - b. Hambatan yang dihadapi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan pemungutan atau penerimaan pajak Restoran.
  - c. Staf-staf pegawai yang terkait dengan penerimaan Pajak Restoran.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak pertama melalui dokumen, monografi, dan paparan data.

Data Sekunder adalah Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa dokumen, arsip instansi dan catatan lain yang diperlukan dari pihak ke dua guna melengkapi penelitian ini meliputi :

- a. Sejarah ringkas kantor Dispenda Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Tugas pokok, kedudukan dan fungsi kantor Dispenda Kabupaten Kuantan Singingi .
- c. Susunan organisasi dan uraian tugas.
- d. Keadaan pegawai dan fasilitas kerja pada kantor Dispenda Kabupaten Kuantan Singingi .
- e. Struktur organisasi kantor Dispenda Kabupaten Kuantan Singingi.

### **3.3 Populasi dan sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek /subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik suatu kesimpulannya ( sugiyono,2007:90).

#### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Suharsimi, Arikunto, 2002:108). Populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua unsur yaitu ; semua pegawai yang ada pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan unsur masyarakat / wajib pajak yang terdiri dari 314

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Suharsimi, Arikunto, 2002:109). Dari populasi pegawai pajak diambil sampel dengan menggunakan sensus, yaitu keseluruhan populasi dijadikan sampel.

Sementara itu, untuk sampel wajib pajak yang jumlahnya 314 orang, disini penulis mengambil sampel secara acak. Sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2002:112) berpendapat bahwa cara menentukan besarnya sampel adalah bila subyeknya kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua dan jika subyeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25%. Oleh karena itu penulis mengambil sampel dari wajib pajak sebanyak 10% dari 314 orang yang berjumlah 31 orang, yang mana teknik sampling yang digunakan ialah random sampling, maka jumlah keseluruhan dari pada sampel adalah dalam penelitian ini sebanyak 108 orang.

Untuk lebih jelasnya, penetapan jumlah populasi dan sampel dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Penetapan Populasi dan Sampel**

No	Sub Populasi (Orang)	Populasi (Orang)	Sampel (Orang)
1	Jumlah Pegawai Pajak	77	77
2	Wajib pajak	314	31
<b>Jumlah</b>		391	108

*Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi, 2011*



### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Metode Obsevasi**

Penulis juga menggunakan metode observasi, dimana penulis melakukan pengamatan langsung terhadap karyawan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **2. Metode Wawancara**

Didalam pengumpulan data Penulis memilih metode wawancara dimana penulis dapat menanyakan secara langsung tentang Strategi apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Terutama pajak rumah makan dan restoran kepada Kepala bagian perpajakan, kasubbag umum, kasubbag program, dan pegawai Dispenda yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **3. Angket/Questioner**

Adalah kegiatan dimana penulis akan memberikan lembaran pertanyaan beserta pilihan jawabannya kepada responden berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini.

#### **4. Dokumentasi**

Dokumentasi asal katanya dari dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian. Dokumentasi digunakan untuk menunjang data-data hasil wawancara maupun observasi. Alasan penggunaan dokumentasi karena kegiatan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan

atau pencapaian target dan realisasi pajak tidak lepas dari adanya dokumen, sehingga dapat melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Dalam mengelolah data yang bersifat deskriptif penulis menggunakan metode kualitatif, dengan cara setelah semuanya didapat atau terkumpul, baru dibuat sebuah ketetapan untuk mengetahui besarnya hasil dari pajak restoran. Dan untuk mengetahui Masalah-masalah yang dihadapi dalam administrasi pembayaran dan strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak restoran.

## **BAB 1V**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1 Tinjauan Umum Kabupaten Kuantan Singingi**

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.

Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten definitif yang terdiri dari 6 Kecamatan dengan 151 pemerintahan Desa / Kelurahan, sebagai berikut:

1. Kecamatan Kuantan Tengah
2. Kecamatan Singingi
3. Kecamatan Kuantan Mudik
4. Kecamatan Kuantan Hilir
5. Kecamatan Cerenti
6. Kecamatan Benai

Sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1999 sampai dengan 8 Oktober 2000 adalah Drs. H. Rusdji S Abrus. Pada bulan Oktober 2000 diadakan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang pertama dipilih oleh anggota legislatif, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah pasangan Drs. H. Rusdji S Abrus dengan Drs. H. Asrul Ja'afar

periode 2001-2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Selang waktu 2 bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, yang ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.24-316 tanggal 20 Agustus 2001. Kabupaten Singingi membawahi 6 kecamatan kemudian dimekarkan menjadi 12 kecamatan, kecamatan yang baru dimekarkan tersebut adalah :

1. Kecamatan Hulu Kuantan
2. Kecamatan Gunung Toar
3. Kecamatan Singingi Hilir
4. Kecamatan Pangean
5. Kecamatan Logas Tanah Darat
6. Kecamatan Inuman

Hingga sekarang Bupati Kabupaten Kuantan Singingi sudah Mengalami beberapa kali pergantian yaitu :

1. Drs. H. Rusdji S Abrus periode Tahun 2000 - 2001
2. Drs. H. Asrul ja'afar periode 2001 – 2006
3. H. Sukarmis periode Tahun 2006 – 2011
4. H. Sukarmis periode Tahun 2011 – Sekarang

Seiring dengan berjalannya reformasi memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Kabupaten Kuantan Singingi yang salah

satu wujudnya adalah dengan berlakunya otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001.

#### **4.1.1 Geografis**

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi, dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas Sumatera dan berada dibagian selatan Provinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 kecamatan dengan luas wilayah 7.656,03 km<sup>2</sup>, yang berada pada posisi antara 0<sup>0</sup> 00 – 1<sup>0</sup> 00 Lintang Selatan dan 101<sup>0</sup> 02 – 101<sup>0</sup> 55 Bujur Timur.

Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Provinsi Jambi
3. Sebelah Barat Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Dilihat dari batas diatas Kabupaten Kuantan Singingi langsung berbatasan dengan 2 (dua) Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada.

#### **4.1.2 Topografi**

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi secara morfologi dapat dibagi atas dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi dan pegunungan, dengan variasi sebagian besar merupakan satuan perbukitan bergelombang yaitu sekitar  $3^0 - 15^0$  diatas permukaan laut.

#### **4.1.3 Geologi**

Secara Struktur Geologi Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sedimen, metamorfosis (malihan), batuan vulkanik dan instrusi serta endapan permukaan. Disamping itu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya mineral yang beragam.

#### **4.1.4 Iklim**

Kabupaten kuantan Singingi pada umumnya beriklim trofis dengan suhu udara maksimum berkisar antara  $32,6^0\text{ C} - 36,5^0\text{ C}$  dan suhu minimum berkisar antara  $19,2^0\text{ C} - 22,0^0\text{ C}$ . Curah hujan antara 229,00-1.133,0 mm pertahun dengan keadaan musim berkisar :

1. Musim hujan jatuh pada bulan September s/d Februari
2. Musim kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus

#### **4.1.5 Hidrografi**

Terdapat dua sungai besar yang melintasi Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan/Sungai Indragiri dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumber daya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air.

Daerah aliran sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, kecamatan Kuantan Hilir dan Kecamatan Cerenti.

#### **4.1.6 Penduduk dan Perkembangannya**

Masalah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi sama halnya seperti di daerah lain di Indonesia. Untuk menciptakan manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi sementara adalah 291.044 jiwa yang terdiri dari 149.368 Laki-laki dan 141.676 Perempuan. Data hasil sensus penduduk juga menunjukkan bahwa Kecamatan Kuantan Tengah adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 52.866 jiwa atau

sebesar 18,16% dari total seluruh penduduk Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian diikuti oleh Kecamatan Singingi Hilir sebesar 35.167 orang (12,08%) dan kecamatan benai sebesar 32.885 orang (11,09%). Sementara itu, 3 kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Hulu Kuantan sebesar 8.032 orang (2,76%), Kecamatan Gunung Toar sebesar 12.348 orang (4,24%), dan kecamatan Inuman sebesar 12.774 orang.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kuantan Singingi per tahun selama 10 tahun terakhir yakni sejak tahun 2000-2010 adalah sebesar 2,6%. Kecamatan Singingi Hilir adalah Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu sebesar 4,74%, disusul oleh Kecamatan Singingi dan Kuantan Tengah sebesar 3,9% dan 3,7%. Sementara itu, kecamatan dengan laju pertumbuhan terendah adalah Kecamatan Inuman sebesar 0,6%.

**Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk masing-masing Kecamatan di Kabupaten Kuantan singingi Tahun 2011**

No	Kecamatan	Luas (Km) <sup>2</sup>	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Kuantan Tengah	291,74	52.866
2	Kuantan Mudik	1.385,92	23.298
3	Kuantan Hilir	363,06	23.433
4	Cerenti	456	13.904
5	Singingi	1.953,66	20.474
6	Benai	249,36	32.285
7	Gunung Toar	165,25	12.348
8	Hulu Kuantan	384,40	8.032
9	Pangean	145,34	16.953
10	Singingi Hilir	1.530,97	35.167
11	Logas Tanah Darat	380,34	14.836
12	Inuman	450,01	12.774
<b>Jumlah</b>			<b>291.044</b>

*Sumber Data : BPS Kabupaten Kuantan Singingi 2011*

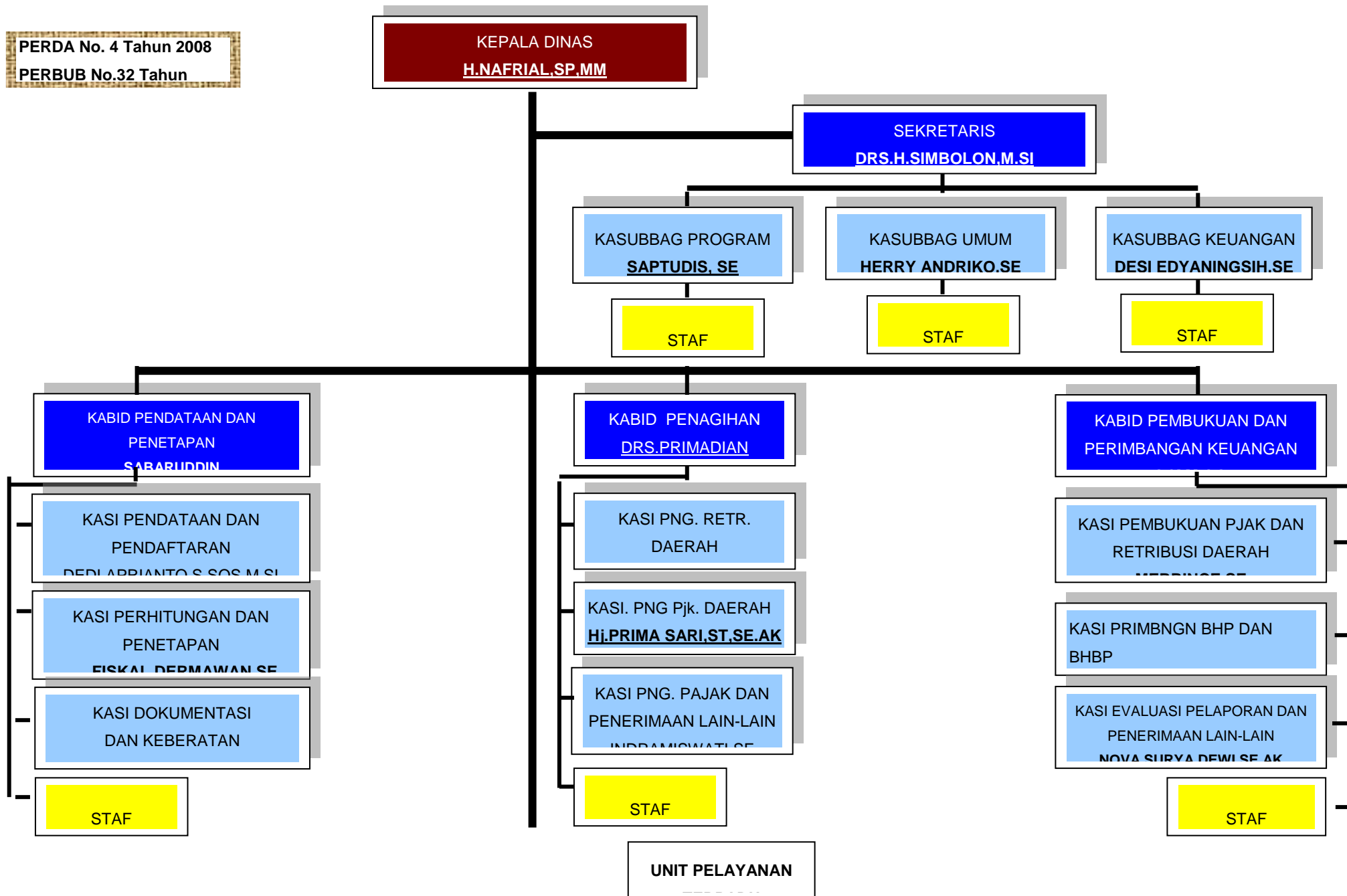


#### **4.2 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**

Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tidak lepas dari awalnya terbentuk Provinsi Riau pada tahun 1958 dan Peraturan pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat Kepada Daerah Swatantra 1 Riau yang merupakan Daerah Otonomi yang berkedudukan di Pekanbaru. Kemudian juga berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra I Riau tanggal 1 September 1958 No. 250/22D/58.

Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 48 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi serta dijabarkan lagi dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2002 tentang tugas pokok dan fungsi yang melengkapi beberapa kewenangan antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan
2. Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan
3. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dan cabang dinas
4. Pembinaan teknis di bidang pendapatan
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan



#### **4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan**

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi. Yaitu :

##### **A. Kepala Dinas**

Tugasnya antara lain sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan bidang pendapatan;
3. Kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan
  - b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pendapatan;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pendapatan;
  - d. Pemberian kajian teknis perizinan dan / atau rekomendasi;
  - e. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pendapatan;

- f. Pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- 4. Kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di bantu oleh sekretaris dan kepala bidang . bidang sebagaimana dimaksud ayat 4 terdiri dari:
  - a. Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
  - b. Bidang Penagihan; dan
  - c. Bidang Pembukuan dan Perimbangan keuangan.

#### B. Sekretaris

- 1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan serta keuangan.
- 3. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengelolaan data;

- b. Penyusunan program dan anggaran bidang program, umum dan keuangan;
  - c. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Pendapatan;
  - d. Penyelenggaraan ketatausahaan;
  - e. Pembinaan Kepegawaian;
  - f. Pengelolaan sarana dan prasarana;
  - g. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
  - h. Penyelenggaraan fungsi kehumasan;
  - i. Pengelolaan keuangan;
  - j. Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Sekretaris dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan analisa / kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan – bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.

5. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), dibantu oleh Sub Bagian.
6. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Umum; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.

#### C. Bidang Pendataan dan Penetapan

1. Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
2. Kepala bidang pendataan dan penetapan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan, dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Kepala bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan ;

- b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan keberatan;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan keberatan;
  - d. Pengkoordinasian pengelolaan pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan keberatan;
  - e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendataan dan pendafteran, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan keberatan; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Kepala bidang dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.

5. Kepala bidang pendataan dan penetapan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dibantu oleh kepala seksi.
6. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
  - a. Seksi pendataan dan pendaftaran;
  - b. Seksi perhitungan dan penetapan; dan
  - c. Seksi dokumentasi dan keberatan

#### D. Bidang Penagihan

1. Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain.
3. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain;



- b. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain;
  - d. Pengkoordinasian pengelolaan penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain;
  - e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk daapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.

5. Kepala Bidang Pengihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh kepala seksi.
6. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
  - a. Seksi Penagihan Retribusi Daerah;
  - b. Seksi Penagihan Pajak Daerah; dan
  - c. Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain.

E. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan

1. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Bidang Pembukuan dan Perimbangan keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, Perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan Penerimaan lain-lain.
3. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil

pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;

- b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil Pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;
  - d. Pengkoordinasian pengelolaan pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;
  - e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan

analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.

5. Kepala Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh kepala seksi .
6. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
  - a. Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. seksi Perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak;
  - c. seksi evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;

#### **4.2.3 Gambaran Umum Pegawai**

Selanjutnya dibawah ini dapat dilihat personil ataupun pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2007-2011.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai instansi yang melakukan pembinaan dan penataan tenaga kerja di Kabupaten Kuantan Singingi, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki pegawai PNS dan pegawai honorer dengan golongan berbeda serta tingkat pendidikan yang berbeda pula. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dilihat dari kondisi kepegawaian dinas pendapatan dari tahun 2007-2011:

**Tabel 4.2 : Kondisi Kepegawaian Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi dari Tahun 2007 s/d 2011**

No	Uraian	TAHUN				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	2	4	5	6	7	8
1	Jumlah PNS	32	50	49	49	46
2	Jumlah Pegawai Honor	30	20	19	17	31
3	Jabatan Struktural :					
	Eselon II	1	1	1	1	1
	Eselon III/A					1
	Eselon III/B	5	6	4	4	3
	Eselon IV	12	12	11	11	12
	Eselon V	-	-	-	-	-
4	Golongan :					
	IV/c	1	1	1	1	1
	IV/b		1	1	1	3
	IV/a	5	5	3	3	1
	III/d	5	2	1	1	1
	III/c	7	11	7	7	3
	III/b	1		5	4	9
	III/a	8	11	9	13	14
	II/d	-	-	-	-	-
	II/c	1	2	3	4	2
	II/b	2	2	1	1	4
	II/a	2	16	17	13	7
	I/d	-	-	-	-	-
	I/c	-	-	-	-	-
	I/b	-	-	-	-	1
	I/a	-	-	1	1	
4	Pendidikan Formal :					
	S – 3	-	-			
	S – 2		1	1	1	3
	S – 1	5	5	21	25	25
	D – 3			2	3	3
	D – 2					
	SLTA	5	2	23	35	12
	SLTP	7	11	1	1	2
	SD	1		1	1	1

*Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi 2011*

#### **4.2.3 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**

VISI :

“ Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Aparat pengelolaan yang ramah, Profesional dan inovatif “.

MISI :

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
2. Meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dan Retribusi
3. Meningkatkan Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah
4. Meningkatkan produktivitas Kerja Pegawai.

#### **4.2.4 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**

Dalam rangka Pencapaian Visi dan Misi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana yang dikemukakan, maka perlu dijabarkan keadaan dalam bentuk yang terarah dan operasional berupa perbuatan tujuan dan sasaran. Tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi antara lain :

1. Meningkatnya kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah;
2. Meningkatnya Pendapatan Daerah;
3. Meningkatnya pelayanan prima kepada wajib pajak;

4. Meningkatkatnya sosialisasi produk-produk hukum tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Meningkatnya pelaksanaan system dan prosedur administrasi Pendapatan Daerah; dan
6. Meningkatnya Profesionalisme Pegawai.

Sedangkan Sasaran Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya tingkat pencapaian Target Pendapatan Daerah minimal 10 % dari tahun sebelumnya;
2. Terlaksananya penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
3. Terlaksananya pelayanan dan penyampaian SKPD, SKRD dan administrasi pelaporan tepat waktu;
4. Terlaksananya penyelesaian administrasi Pajak dan Retribusi Daerah yang cepat dan tertib;
5. Terlaksananya Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan baik dan akuntabel;
6. Terlaksananya pencapaian realisasi Pendapatan Daerah;
7. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas kerja yang memadai;
8. Terlaksananya hubungan kerja yang nyaman dan harmonis;

9. Terlaksananya kegiatan sosialisasi Produk Hukum tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
10. Terwujudnya kesadaran wajib pajak/ retribusi daerah dalam memenuhi kewajibannya;
11. Terlaksananya system dan prosedur administrasi Pendapatan Daerah oleh Unit Kerja pengelola Pajak /Retribusi Daerah;
12. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi Pegawai; dan
13. Terwujudnya validasi data yang pasti dan dapat dipertanggung jawabkan

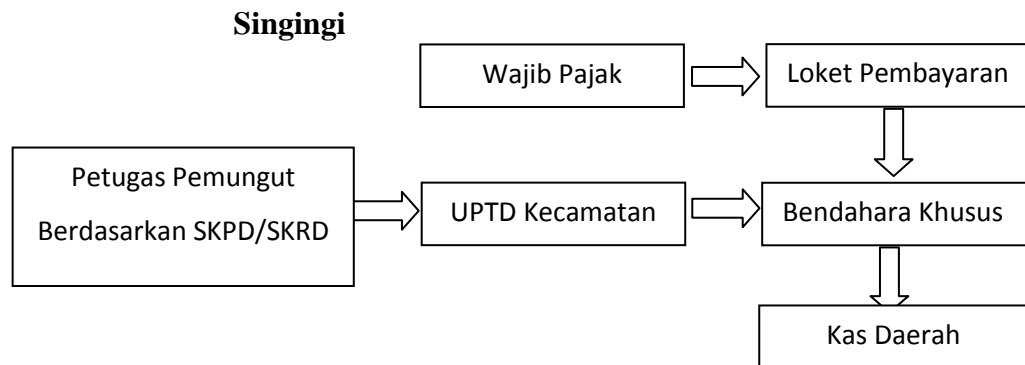
#### **4.2.5 Mekanisme Penerimaan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**

Dalam proses pembayaran atau pemungutan pajak restoran yaitu ada dua cara. Cara pertama yaitu wajib pajak langsung menyetor kewajibannya kepada Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) melalui loket pembayaran yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian cara kedua yaitu Petugas Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pemungutan berdasarkan SKPD/SKRD, kemudian UPTD kecamatan melakukan pemungutan pajak terhadap wajib pajak restoran. Setelah dilakukan pemungutan pajak tersebut maka disetorkan kepada Bendahara Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi dengan menunjukkan bukti setoran tersebut dan disampaikan ke



bidang pembukuan. Adapun skema penerimaan pajak restoran dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.3 : Skema Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kuantan**



## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1. Identitas Responden**

Sebelum hasil ini disampaikan, untuk memperoleh informasi penelitian maka peneliti menjabarkan identitas responden. Adapun responden disini adalah pegawai pajak dan wajib pajak restoran di Kabupaten Kuantan Singingi. Responden penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir. Adapun identitas responden adalah :

A. Identitas responden pegawai pajak

##### **5.1.1 Jenis Kelamin**

Untuk lebih jelasnya tentang responden ditinjau dari jenis kelaminnya dapat dilihat pada table 5.1 dibawah ini :

**Tabel. 5.1 : Jenis Kelamin Responden**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Laki-laki	34	44
2	Perempuan	43	56
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100</b>

*Sumber Data : Data Olahan peneliti, 2013*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden dari pegawai pajak yang berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dari jenis kelamin perempuan, yakni jumlah responden laki-laki sebanyak 34 orang atau 44% dan jumlah responden perempuan sebanyak 43 orang atau 56%.

### 5.1.2 Pendidikan Terakhir

Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin diatas, juga memiliki pendidikan terakhir yang berbeda-beda. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 5.2 : Tingkat Pendidikan Responden**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tamat SMA	26	34
2	Tamat D3	4	5
3	Tamat S1	43	56
4	Tamat S2	4	5
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100</b>

*Sumber Data : Data Olahan peneliti, 2013*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden atau pegawai yang ada di DIPENDA Kabupaten Kuantan Singingi sebagian besar yaitu tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah 26 orang atau 34%, responden yang tamat D3 sebanyak 4 orang atau 5%, selebihnya responden yang memiliki tamatan S1 sebanyak 43 orang atau 56%, dan tamatan S2 sebanyak 4 orang atau 5%. Oleh karena banyaknya pegawai pajak yang tingkat pendidikannya tamat S1 maka sumber daya manusia yang ada di DIPENDA Kabupaten Kuantan Singingi sudah tergolong sangat baik yang dinilai akan berpengaruh dalam menjalankan tugas yang dibebankan dan strategi yang mereka hasilkan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

### 5.1.3. Usia

Secara keseluruhan usia responden atau pegawai pajak yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berbeda-beda, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 5.3 : Tingkat Usia Responden**

No	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1	20-30 Tahun	20	26
2	31-40 Tahun	37	48
3	41 -50 Tahun	15	19
4	50 Tahun Keatas	5	7
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100</b>

*Sumber Data : Data Olahan peneliti, 2013*

Dari tabel diatas dapat diketahui tingkat usia responden pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki usia 20-30 tahun yakni sebanyak 20 orang atau 26%, yang memiliki usia 31-40 tahun yakni sebanyak 37 orang atau 48%, dan yang memiliki usia 40-50 tahun yakni sebanyak 15 orang atau 19%, serta yang memiliki usia diatas 50 tahun sebanyak 5 orang atau 7%.

## B. Identitas responden wajib pajak

### 5.1.4 Jenis Kelamin

Untuk lebih jelasnya tentang responden ditinjau dari jenis kelaminnya dapat dilihat pada table 5.1 dibawah ini :

**Tabel. 5.4 : Jenis Kelamin Responden**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	17	55
2	Perempuan	14	45
<b>Jumlah</b>		<b>31</b>	<b>100</b>

*Sumber Data : Data Olahan peneliti, 2013*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden dari wajib pajak atau pengusaha restoran yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jenis kelamin perempuan, yakni jumlah responden laki-laki sebanyak 17 orang atau 55% dan jumlah responden perempuan sebanyak 14 orang atau 45%.

### 5.1.5 Pendidikan Terakhir

Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin diatas, juga memiliki pendidikan terakhir yang berbeda-beda. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 5.5 : Tingkat Pendidikan Responden**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tamat SMP	4	13
2	Tamat SMA	13	42
3	Tamat S1	14	45
<b>Jumlah</b>		<b>31</b>	<b>100</b>

*Sumber Data : Data Olahan peneliti, 2013*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan wajib pajak atau pemiik rumah makan dan restoran sebagian besar yaitu tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah 4 orang atau 13%, responden yang tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 13 orang atau 42%, selebihnya responden yang memiliki tamatan S1 sebanyak 14 orang atau 45%.

#### **5.1.6. Usia**

Secara keseluruhan usia responden atau wajib pajak restoran berbeda-beda, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 5.6 : Tingkat Usia Responden**

<b>No</b>	<b>Tingkat Usia</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	20-30 Tahun	10	32
2	31-40 Tahun	13	42
3	41 -50 Tahun	5	16
4	50 Tahun Keatas	3	10
<b>Jumlah</b>		<b>31</b>	<b>100</b>

*Sumber Data : Data Olahan peneliti, 2013*

Dari tabel diatas dapat diketahui tingkat usia responden pada wajib pajak yang memiliki usia 20-30 tahun yakni sebanyak 10 orang atau 32 %, yang memiliki usia 31-40 tahun yakni sebanyak 13 orang atau 42%, dan yang memiliki usia 40-50 tahun yakni sebanyak 5 orang atau 16%, serta yang memiliki usia diatas 50 tahun sebanyak 3 orang atau 10%.

## **5.2 Strategi Tentang Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten**

### **Kuantan Singingi**

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (observasi), dan menyebarkan angket, maka dapat diketahui hasil jawaban dari setiap pertanyaan yang telah diberikan kepada responden. Dengan demikian diketahuilah penilaian terhadap strategi tentang peningkatan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan variabel yang dipecahkan menjadi angket, variabel tersebut ialah:

#### **5.2.1 Pelayanan Kepada Wajib Pajak**

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus menggunakan strategi atau langkah-langkah agar masyarakat tidak mengeluh lagi atas pelayanan yang diberikan. Hal ini tidak terlepas dari upaya untuk meningkatkan pelayanan agar menjadi lebih baik lagi untuk kelancaran hubungan masyarakat agar menunjang terlaksananya pelayanan yang efektif.

Yang dimaksud pelayanan kepada wajib pajak dalam penelitian ini adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak terhadap wajib pajak. Pelayanan yang diberikan harus santun dan ramah, karena dengan pelaksanaan pelayanan yang santun dan ramah akan membuat si wajib pajak merasa nyaman, tidak mempersulit pelayanan yang diberikan karena harus sesuai dengan prosedur, serta memberikan informasi tentang pajak restoran secara transparan dan terbuka. Hal itulah yang coba dilakukan DIPENDA Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang berpedoman pada visi yang

mereka terapkan, yaitu : “Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Aparat Pengelola Yang Ramah, Profesional dan Inovatif ” serta asas yang selalu mereka terapkan seperti spanduk yang bertuliskan : “melayani masyarakat adalah kewajiban pegawai negeri, meminta atau menerima imbalan adalah korupsi.”

Tidak bisa dipungkiri lagi hal ini sangat penting dalam menentukan faktor yang mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak restoran, karena jika pelayanan yang diberikan tidak memuaskan maka si wajib pajak malas untuk membayar pajak dan berurusan dengan pihak petugas.

Untuk mengetahui tanggapan responden dapat dilihat dari indikator pelayanan kepada wajib pajak, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel. 5.7 : Tanggapan Responden Tentang faktor pelayanan kepada wajib pajak**

No	Pertanyaan	Setuju	Kurang Setuju	Ragu Ragu	Tidak Setuju	Jumlah
1.	Pembayaran pajak diproses cepat oleh petugas, sehingga tidak menyita waktu anda.	75	20	-	13	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>69</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
2	Petugas memberikan pelayanan dengan ramah dan sopan.	70	20	10	8	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>65</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>100</b>
3	Informasi tentang pemungutan pajak restoran diterangkan secara transparan (terbuka).	80	10	-	18	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>74</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>100</b>
4	Apakah saudara setuju pelayanan yang selama ini diberikan oleh petugas sudah memuaskan.	73	7	20	8	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>68</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>100</b>
5	Menurut saudara sistem kerja yang dilakukan petugas sudah berjalan dengan baik.	82	5	11	10	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>76</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>100</b>
	Jumlah	380	62	41	57	540
	<b>Persentase (%)</b>	<b>70</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

*Sumber Data : Data Olahan peneliti, 2013*

Dari tabel rekapitulasi diatas diketahui bahwa mayoritas responden menjawab 70% setuju dengan pelayanan kepada wajib pajak di proses dengan cepat, sehingga tidak menyita waktu wajib pajak, memberikan pelayanan dengan

ramah, menerangkan informasi tentang pajak restoran secara transparan, pelayanan yang diberikan petugas memuaskan dan sistem kerja petugas berjalan dengan baik. Hal ini berarti sudah sesuai dengan ketentuan yang ada serta masyarakat juga merasa puas. Selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 11%, responden yang menjawab ragu-ragu sebanyak 8% dan yang tidak setuju sebanyak 11% dari keseluruhan responden.

Banyaknya responden yang menjawab setuju dikarenakan pelayanan yang diberikan pegawai pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mulai dari pendaftaran, pendataan, pemungutan, sampai pengawasan, diproses dengan cepat, tidak berbelit-belit dari meja satu ke meja lainnya, sehingga tidak menyita waktu si wajib pajak, dilayani dengan sopan dan ramah, serta menerangkan informasi tentang pajak restoran secara transparan.

Menurut Bapak Dedi yaitu salah satu pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang bertugas sebagai kasi pendataan dan pendaftaran mengatakan “wajib pajak yang datang untuk mendaftar atau pun membayar pajak, dilayani dengan ramah dan akan kami usahakan untuk memprosesnya dengan cepat sehingga tidak memakan waktu lama,” (Hasil wawancara)

### **5.2.2 Keadilan Kepada Wajib Pajak**

Adapun yang dimaksud dengan keadilan dalam hal ini adalah pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang pribadi sebanding dengan kemampuannya membayar pajak serta sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

Untuk mengetahui tanggapan responden dari indikator keadilan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 5.8 : Tanggapan Responden Tentang faktor Keadilan**

No	Pertanyaan	Setuju	Kurang Setuju	Ragu Ragu	Tidak Setuju	Jumlah
1.	Jumlah pajak yang harus diserahkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, sudah sesuai dengan penghasilan yang anda dapatkan.	73	27	3	5	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>68</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>100</b>
2	Pemungutan pajak dilakukan dengan tidak membedakan antar wajib pajak yang satu dengan yang lainnya.	73	19	7	9	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>68</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>100</b>
3	Pemungutan pajak restoran dikenakan bagi semua restoran secara merata.	60	23	-	25	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>56</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>100</b>
4	Pajak yang anda bayarkan sesuai dengan manfaat yang anda dapatkan.	73	27	-	8	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>68</b>	<b>25</b>		<b>7</b>	<b>100</b>
5	Apakah anda setuju dengan tarif pajak restoran yang ditetapkan pemerintah sebesar 10%.	80	16	5	7	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>74</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>100</b>
	Jumlah	359	112	15	54	540
	<b>Persentase (%)</b>	<b>66</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

*Sumber Data : Data Olahan peneliti, 2013*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab setuju, yaitu sebanyak 66% dari 108 orang jumlah keseluruhan responden. Setelah direkapitulasi mayoritas responden menjawab setuju karena jumlah pajak yang harus diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, sudah sesuai dengan penghasilan yang didapatkan dan setuju dengan tarif pajak yang dikenakan bagi semua restoran secara merata dan dikarenakan pemungutan pajak dilakukan dengan tidak membedakan antara wajib pajak yang satu dengan yang lainnya serta pajak yang dibayarkan sesuai dengan manfaat yang diterima. Selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab kurang setuju yaitu sebanyak 21%, sedangkan responden yang menjawab ragu-ragu 3% dan tidak setuju 10% dari total rekapitulasi jawaban responden atas indikator faktor keadilan.

Menurut Ibu Merrince yaitu salah satu pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang bertugas sebagai kasi pembukuan dan retribusi daerah mengatakan “pemungutan pajak dilakukan dengan tidak membedakan antara wajib pajak yang satu dengan yang lainnya dan dilakukan secara adil, ini dibuktikan dengan jika setiap badan atau instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi mengadakan acara yang ada makan dan minumannya juga dikenakan pajak sebesar 10%, ” (Hasil wawancara)

Sedangkan masih adanya responden yang menjawab kurang setuju, ragu-ragu dan tidak setuju dikarenakan masih ada atau tidak semua restoran dan rumah makan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang terdaftar sebagai wajib pajak restoran. Oleh karena itu diharapkan kepada pihak terkait yaitu pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat mendata semua restoran yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Mayoritas responden yang menjawab setuju dikarenakan jumlah pajak yang dibayar responden sudah sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan yaitu 10% dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang makan dan minum di restoran dan rumah makan tersebut, hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak restoran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah seorang pemilik rumah makan mengatakan “ Pajak yang kami bayarkan kepada petugas pemungut pajak restoran yaitu Dinas Pendapatan Daerah sudah sesuai dengan penghasilan yang kami dapatkan, lagi kan penetapan tarif pajak restoran juga sama seperti yang ditetapkan kabupaten lain, sehingga kami tidak keberatan” (Hasil wawancara)

### **5.2.3 Kepastian dan Penegakan Hukum**

Yang dimaksud kepastian dan penegakan hukum dalam penelitian ini adalah penegakan sanksi merupakan salah satu upaya penerapan hukum yang tegas dan adil terhadap masyarakat, agar mereka memenuhi peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tujuan penetapan sanksi sebagai upaya menyadarkan masyarakat untuk membayar kewajibannya secara tepat waktu guna mencapai target penerimaan pajak daerah. Untuk mengetahui tanggapan responden dapat dilihat dari indikator kepastian dan penegakan hukum tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 5.9 : Tanggapan Responden Tentang Faktor Kepastian Dan Penegakan Hukum**

No	Pertanyaan	Setuju	Kurang Setuju	Ragu Ragu	Tidak Setuju	Jumlah
1.	Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak.	59	21	9	19	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>55</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>100</b>
2	Tegasnya sanksi yang diberikan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu motivasi anda untuk taat membayar pajak restoran.	73	12	23	-	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>68</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
3	Sanksi yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.	70	25	5	8	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>65</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>100</b>
4	Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memberikan ketegasan sanksi kepada petugas yang kurang optimal dalam melakukan pemungutan.	73	23	12	-	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>68</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
5	Apakah anda setuju dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak restoran	82	11	15	-	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>76</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
	Jumlah	357	92	64	27	540
	<b>Persentase (%)</b>	<b>66</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>100</b>

*Sumber Data : Data Olahan peneliti, 2013*

Dari tabel rekapitulasi diatas diketahui mayoritas responden menjawab 66% setuju dengan petugas pemungut pajak dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang terlambat bayar dan tidak bayar, serta sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 17%, ragu-ragu sebanyak 12% dan yang paling sedikit yaitu responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 5%.

Banyaknya responden yang menjawab setuju dikarenakan kepastian dan penegakan hukum yang diberlakukan petugas sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, apabila pajak restoran yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran maka petugas yang ditunjuk akan melakukan penagihan pajak.

Tujuan dari pelaksanaan penagihan adalah sebagai proses usaha penegakan hukum agar wajib pajak restoran memenuhi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No.3 Tahun 2011 pasal 12, wajib pajak akan dikenakan denda sebesar 2% perbulannya. Namun sanksi ini belum bisa dilakukan karena DIPENDA dalam hal ini masih mengedepankan asas toeransi atau tenggang rasa karena masih memikirkan kondisi masyarakat daerah.

Pembayaran yang benar adalah pembayaran yang dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran, jika saat jatuh tempo wajib pajak juga belum membayar kewajibannya maka Dinas Pendapatan Akan mengirimkan surat peringatan dan mengirimkan petugas pemungut kelapangan dan jika itu tidak juga membuat wajib pajak sadar untuk membayar kewajibannya maka DIPENDA akan

melaporkan hal ini ke pihak terkait seperti satpol pp atau KPPT untuk memungut langsung dan membuat mereka jera, malu, serta sadar dan sanksi terburuknya yaitu izin usaha wajib pajak bisa dicabut.

Menurut Bapak fiskal yaitu salah satu pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang bertugas sebagai kasi perhitungan dan penetapan mengatakan “selama ini sanksi yang kami berlakukan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak yaitu pertama mengirimkan surat peringatan dan petugas pemungut untuk turun langsung kelapangan untuk memungut pajak dan jika itu tidak juga di’ idahkan wajib pajak maka kami akan melaporkan ke pihak terkait seperti Satpol PP dan KPPT agar mereka langsung melakukan penagihan kepada wajib pajak yang membuat wajib pajak itu sadar dan jera” (Hasil wawancara)

#### **5.2.4 Keterbukaan Adminstrasi Perpajakan**

Yang dimaksud keterbukaan administrasi perpajakan dalam penelitian ini adalah keberhasilan dalam penerimaan pajak daerah sangat ditunjang oleh pelaksanaan administrasi yang baik dan efisien. Diawali dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selaku unsur pelaksana dan penanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, yang berusaha untuk menciptakan informasi yang transparan agar wajib pajak mengerti akan pentingnya membayar pajak dengan menerapkan strategi seperti pemasangan spanduk di daerah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang bertuliskan : “ pajak dan retribusi yang anda bayar bukti kepedulian anda dalam membangun Kabupaten Kuantan Singingi ”, “ pajak yang anda bayar bukti cinta pada nogori”, “ terima kasih atas partisipasi anda melunasi pajak dan retribusi daerah tepat pada waktunya”, yang mana tulisan-tulisan ini akan mencerminkan keterbukaan informasi dan membuat wajib pajak mengerti akan pentingnya pajak untuk pembangunan daerah, kemudian pada tahap berikutnya tahap pendataan dan



pendaftaran, perhitungan dan penetapan pajak, pembukuan dan pelaporan, dan tahap terakhir adalah pembayaran dan pemungutan/penagihan yang kemudian semua penerimaan pajak restoran masuk kedalam Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Sistem dan prosedur pemungutan pajak restoran di Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tahapan-tahapan atau rangkaian secara sistematis dan berurutan. Adapun rangkaian sistem dan prosedur penerimaan pajak restoran dimulai dari pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, pembukuan dan pelaporan, pembayaran dan pemungutan/penagihan. hal ini bertujuan untuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat berjalan secara optimal.

Untuk mengetahui tanggapan responden dilihat dari indikator keterbukaan administrasi perpajakan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 5.10 : Tanggapan Responden Tentang faktor Keterbukaan Administrasi Perpajakan**

No	Pertanyaan	Setuju	Kurang Setuju	Ragu Ragu	Tidak Setuju	Jumlah
1.	Birokrasi pembayar pajak restoran tidak berbelit-belit.	73	19	7	9	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>68</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>100</b>
2	Informasi tentang prosedur pembayaran pajak restoran diterangkan secara transparan.	70	30	3	5	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>65</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>100</b>
3	Pelaksanaan Administrasi pemungutan pajak mulai dari pendaftaran hingga pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik.	50	45	-	13	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
4	Data Para wajib pajak restoran sudah relevan dengan lapangan.	65	15	8	20	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>60</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>100</b>
5	Pelaksanaan pembukuan dan pencatatan laporan pajak restoran sesuai dengan peraturan yang ada.	55	15	38	-	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>51</b>	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
	Jumlah	313	124	56	47	540
	<b>Persentase (%)</b>	<b>58</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>100</b>

*Sumber Data : Data Olahan peneliti, 2013*

Dari rekapitulasi tabel diatas diketahui bahwa mayoritas responden menjawab 58% setuju dengan keterbukaan administrasi perpajakan yaitu birokrasi pajak restoran tidak berbelit-belit, informasi tentang prosedur pembayaran pajak diterangkan secara transparan, pelaksanaan administrasi mulai dari pendaftaran hingga pengawasan berjalan dengan baik, data para wajib pajak sudah relevan dengan lapangan dan juga pelaksanaan pembukuan dan pencatatan laporan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab kurang setuju 23%, yang menjawab ragu-ragu 10% dan paling yang sedikit tidak setuju sebanyak 9%.

Banyaknya responden yang menjawab setuju dengan keterbukaan administrasi perpajakan dikarenakan proses administrasi yang dijalani oleh si wajib pajak tidak berbelit-belit, semua informasi tentang prosedur pendaftaran, pembayaran dan pemungutan pajak, dan sanksi yang akan dikenakan jika telat bayar secara terbuka. Pembukuan dan pelaporan pajak restoran dari hasil pemungutan di arsip dan dilaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah seorang pemilik rumah makan mengatakan “ sistem dan prosedur serta informasi yang diberikan Dipenda selama ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, dimana petugas yang diturunkan oleh Dipenda mendata sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak berbelit-belit urusannya, dan banyaknya spanduk yang bertuliskan pentingnya membayar pajak adalah bukti keterbukaan administrasi yang coba dilakukan DIPENDA untuk menghasilkan informasi yang transparan ” (Hasil wawancara)

### **5.2.5 Ketaatan Wajib Pajak**

Ketaatan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak merupakan hal pokok dalam perpajakan daerah tidak bisa terlahir dengan sendirinya tanpa adanya control dari pemerintah itu sendiri. selain upaya penegasan sanksi untuk meningkatkan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak daerah, pemerintah juga berupaya bersosialisasi dengan masyarakat agar masyarakat tertarik dan patuh dalam membayar pajak merupakan salah satu bentuk solusi agar masyarakat tahu arti pentingnya pajak daerah bagi daerah maupun masyarakatnya.

Dan juga ketaatan masyarakat dalam membayar pajak sangat penting dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah melalui pajak yang mereka bayar. Oleh Karena itu, maka diharapkan pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk meningkatkan pembangunan daerah.

Untuk mengetahui tanggapan responden dapat dilihat dari indikator ketaatan wajib pajak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 5.11 : Tanggapan Responden Tentang faktor Ketaatan Wajib Pajak**

No	Pertanyaan	Setuju	Kurang Setuju	Ragu Ragu	Tidak Setuju	Jumlah
1.	Pembayaran pajak restoran dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan kesadaran sendiri.	55	15	-	38	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>51</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>100</b>
2	Wajib pajak mengetahui tentang pentingnya membayar pajak restoran berdasarkan sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.	65	40	3	-	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>60</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
3	Wajib pajak membayar pajak restoran tepat pada waktu yang telah ditentukan.	49	40	6	13	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
4	Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah efektif.	48	40	-	20	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>44</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>100</b>
5	Partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak restoran sangat penting.	60	48	-	-	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>56</b>	<b>44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
	Jumlah	277	183	9	71	540
	<b>Persentase (%)</b>	<b>51</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>100</b>

*Sumber Data : Data Olahan peneliti, 2013*

Dari tabel rekapitulasi diatas, diketahui bahwa responden yang menjawab pertanyaan dari pembayaran pajak dilakukan berdasarkan kesadaran sendiri, mengetahui pentingnya membayar pajak dari sosialisasi, wajib pajak membayarkan pajak restorannya tepat waktu, sosialisasi yang dilakukan petugas sudah efektif, dan partisipasi masyarakat sangat penting. Jawaban responden yang setuju dengan ketaatan wajib pajak sebesar 51%, lalu diikuti dengan kurang setuju 34%, ragu-ragu 2% dan yang menjawab tidak setuju sebesar 13%. Responden yang menjawab setuju dikarenakan sebagian dari responden atau wajib pajak membayar pajaknya atas kesadaran sendiri dan juga tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap seorang pemilik restoran mengatakan “ pajak yang kami bayarkan kepada petugas pemungut, dalam hal ini petugas pemungut dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selalu tepat waktu sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.”(hasil wawancara) .

Sedangkan sebagian besar yang menjawab kurang setuju karena sebagian besar masyarakat tahu dan sadar atas kewajibannya membayar pajak, namun terkadang sering kali mereka lupa karena kesibukannya, dan ada juga yang sengaja menunda-nunda pembayaran, hingga menunggu petugas pemungut pajak restoran datang ketempat usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah seorang pemilik rumah makan mengatakan “ terkadang saya lupa untuk membayar pajak ke kantor karena terlalu sibuk dengan pekerjaan saya (rumah makan) setiap hari sehingga hampir tiap bulannya petugas yang datang langsung kesini.”(Hasil wawancara)

### **5.2.6 Pencapaian Target dan Realisasi Pajak Restoran**

Penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan Penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang. Dijelaskan bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Dan dalam Buku Saku Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 terdapat beberapa cara atau strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan peningkatan penerimaan pajak antara lain untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, keadilan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastiaan dan penegakkan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan ketaatan wajib pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang meningkatnya penerimaan pajak restoran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 5.12 : Tanggapan Responden Tentang Penerimaan Pajak Restoran**

No	Pertanyaan	Setuju	Kurang Setuju	Ragu Ragu	Tidak Setuju	Jumlah
1.	Meningkatnya penerimaan pajak restoran didukung oleh faktor pelayanan kepada wajib pajak	80	5	23	-	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>74</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
2	Meningkatnya penerimaan pajak restoran didukung oleh faktor keadilan	60	18	22	8	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>56</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>100</b>
3	Meningkatnya penerimaan pajak restoran didukung oleh faktor kepastian dan penegakkan hukum	58	17	15	18	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>54</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>100</b>
4	Meningkatnya penerimaan pajak restoran didukung oleh faktor keterbukaan administrasi perpajakan	75	5	20	8	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>69</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>100</b>
5	Meningkatnya penerimaan pajak restoran didukung oleh faktor ketaatan wajib pajak	50	25	8	25	108
	<b>Persentase (%)</b>	<b>47</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>100</b>
	Jumlah	323	70	88	59	540
	<b>Persentase (%)</b>	<b>60</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

*Sumber Data : Data Olahan peneliti, 2013*

Dari tabel rekapitulasi diatas meningkatnya penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kuantan Singingi dari ke 5 faktor yang ada 60% responden menjawab setuju, 13% menjawab kurang setuju, 16% menjawab ragu-ragu dan 11% responden menjawab tidak setuju. Dari keterangan diatas berarti kebanyakan



responden setuju dengan strategi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, keadilan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakkan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan ketaatan wajib pajak.

### **5.3 Pembahasan**

Setelah menjelaskan hasil penelitian dari observasi, angket dan wawancara dalam penjelasan diatas, maka berikut ini dijelaskan, pembahasan tentang hasil rekapitulasi dari keseluruhan penelitian, yaitu sebagai berikut :

**Tabel. 5.13 : Rekapitulasi Keseluruhan Quisioner**

No	Indikator	Setuju	Kurang Setuju	Ragu Ragu	Tidak Setuju	Jumlah
1.	Pelayanan kepada wajib pajak.	380	62	41	57	540
	<b>Persentase (%)</b>	<b>70</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>100</b>
2	Keadilan	359	112	15	54	540
	<b>Persentase (%)</b>	<b>66</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>100</b>
3	Kepastian dan penegakan hukum	357	92	64	27	540
	<b>Persentase (%)</b>	<b>66</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>100</b>
4	Keterbukaan administrasi perpajakan	313	124	56	47	540
	<b>Persentase (%)</b>	<b>58</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>100</b>
5	Ketaatan wajib pajak	277	183	9	71	540
	<b>Persentase (%)</b>	<b>51</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>100</b>
6	Penerimaan pajak	323	70	88	59	540
	<b>Persentase (%)</b>	<b>60</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>100</b>
Total/jumlah		<b>2009</b>	<b>643</b>	<b>273</b>	<b>315</b>	<b>3240</b>
		<b>62</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

**Sumber Data : Data Olahan peneliti, 2013**

Dari tabel diatas tentang tanggapan responden mengenai strategi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak restoran, ternyata responden

terbanyak 62% menilai setuju, dan diikuti kurang setuju 20%, ragu-ragu 8% dan yang tidak setuju sebesar 10%.

#### **5.4 Strategi Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan daerah yang mempunyai peran penting dalam melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pengelolaan pajak harus maksimal dan yang lebih utama adalah strategi yang dilakukan untuk peningkatan penerimaan pajak. adapun salah satu objek yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah adalah Pajak Restoran, hal ini penting artinya mengingat restoran dan rumah makan di Kabupaten Kuantan Singingi terus meningkat.

Strategi yang dilakukan Dinas Pendapatan Dearah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran sehingga setiap tahunnya realisasi melebihi target yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Strategi yang dilakukan DIPENDA adalah:

1. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, pelayanan dalam arti menerima si wajib pajak dengan ramah dan sopan, tidak berbelit-belit dalam proses pendaftaran hingga pemngutan pajak, diproses dengan cepat sehingga tidak menyita waktu wajib pajak, serta memberikan informasi tentang pajak restoran secara terbuka.
2. Peningkatan pajak restoran tidak terlepas dari ketegasan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang telat bayar dan kurang bayar, sampai sejauh ini sanksiyang yang telah diterapkan berupa sanksi administrasi

sebesar 2% dari pajak yang harus dibayarkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan juga surat peringatan, walaupun belum pernah dilakukan sampai sanksi penyitaan restoran milik wajib pajak.

3. Proses pemungutan pajak restoran dilakukan oleh petugas pemungut dengan 2 cara, diantaranya si wajib pajak datang langsung ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk membayar pajak, dan yang ke dua petugas pemungut pajak selalu rutin setiap bulannya datang ke restoran-restoran dan rumah makan yang ada untuk memungut pajak, dengan petugas yang datang langsung ini dapat meningkatkan penerimaan pajak, karena terkadang si wajib pajak lupa akan kewajibannya untuk membayar pajak restoran.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kasi pendataan dan pendaftaran di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu : meningkatnya penerimaan pajak restoran dari tahun ke tahun yaitu dari tahun 2007 hingga tahun 2011 karena kami dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memungut langsung ke restoran-restoran dan rumah makan yang ada di kabupaten Kuantan Singingi jika mereka telat bayar pajak, dan juga dari segi pelayanan kami berusaha memberikan yang terbaik untuk wajib pajak, yaitu dengan ramah tamah, sopan, dan tidak berbelit-belit. Sehingga tidak menyita waktu si wajib pajak, selanjutnya usaha kami dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran yaitu memberikan sanksi administrasi bagi wajib pajak, yang telat bayar dan tidak bayar, serta memberikan surat peringatan. (Hasil wawancara).

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak restoran, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang dibahas pada bab awal, untuk itu peneliti merumuskan sebagai berikut :

Hasil penelitian lapangan menunjukkan Strategi yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi , sesuai dengan hasil rekapitulasi keseluruhan quisioner pada tabel 5.13 , yaitu yang menjawab setuju sebanyak 62%, yang kurang setuju sebanyak 20%, Ragu-ragu 8% dan yang menjawab tidak setuju 10% karena :

1. Responden yang menjawab setuju 62%, didonimasi oleh faktor-pelayanan kepada wajib pajak sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu petugas melayani dengan ramah tamah, sopan, tidak berbelit-belit dan juga tidak banyak menyita waktu si wajib pajak. Faktor kepastian dan penegakan hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu wajib pajak yang telat bayar atau tidak bayar diberikan sanksi administrasi yaitu sebesar 2%. Dan juga faktor keterbukaan administrasi perpajakan juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dimana petugas sudah melakukan pendataan (bagi wajib pajak yang sudah

terdaftar, pendaftaran, pemungutan dan pelaporan pajak restoran, serta tidak berbelit-belit dan juga memberikan informasi tentang prosedur pembayaran pajak restoran secara transparan seperti banyaknya spanduk yang bertuliskan pentingnya membayar pajak.

2. Responden menjawab kurang setuju sebanyak 20%, Ragu-ragu sebanyak 8% dan tidak setuju sebanyak 10% didominasi oleh faktor keadilan karena masih ada restoran dan rumah makan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan juga faktor ketaatan wajib pajak, sebagian besar responden sering kali lupa atau menunda-nunda membayar pajak dan sosialisasi yang kurang dari petugas dan juga dari DIPENDA Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga ada yang menunggu petugas pemungut datang baru pajak dibayarkan.
3. Terjadinya peningkatan penerimaan pajak restoran setiap tahunnya bahkan melebihi target yang telah ditetapkan juga dikarenakan oleh sumber daya manusia/tingkat pendidikan pegawai yang ada di Dispenda sudah tergolong sangat baik yang dinilai akan berpengaruh dalam menjalankan tugas yang dibebankan dan strategi yang mereka hasilkan dalam meningkatkan penerimaan pajak.
4. Terjadinya penurunan realisasi pada Tahun 2010 dan adanya penambahan target ditahun berikutnya dikarenakan:

- a. Adanya usaha pemilik restoran yang buka dan tutup setiap tahunnya, sehingga penerimaan dari sektor pajak restoran tidak selalu sama.
  - b. Dana APBD bagi setiap instansi untuk mengadakan acara yang ada makan dan minumannya, tiap tahun tidak selalu sama.
5. Strategi atau upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hasil penelitian lapangan juga wawancara kepada kasi pendataan dan pendaftaran yaitu pertama, Strategi yang dilakukan adalah pelayanan kepada wajib pajak dengan ramah tamah, sopan, tidak berbelit-belit, cepat sehingga tidak menyita waktu si wajib pajak, dan memberikan informasi tentang pajak restoran secara transparan. Strategi yang ke dua adalah penegakan sanksi bagi wajib pajak yang telat bayar atau yang tidak mau bayar diberikan sanksi administrasi sebesar 2% dari pajak yang harus dibayarkan. Strategi atau upaya yang ketiga yaitu petugas pemungut pajak dari DIPENDA Kabupaten Kuantan Singingi dalam setahun ada 3 atau 4 kali datang ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan pemungutan pajak restoran secara langsung dari restoran yang satu ke restoran yang lainnya. Selain itu, petugas pemungut pajak restoran atau juru pungut kecamatan yang ditunjuk setiap bulannya rutin turun langsung ke restoran-restoran untuk memungut pajak restoran sehingga penerimaan

pajak restoran dari tahun ke tahun di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terus meningkat.

## **6.2 Saran**

Setelah memperhatikan hasil-hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan masyarakat sebagai wajib pajak, adapun beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Dinas Pendapatan Daerah beserta pihak terkait untuk bisa mempertahankan dan memprioritaskan strategi yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak restoran agar kedepannya lebih baik dan lebih efektif dalam proses pemungutan pajak restoran agar pencapaian targetnya terus meningkat.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi hendaknya selalu melakukan pendataan terhadap restoran atau pun rumah makan yang baru melakukan usahanya dan mengontrol usaha restoran, serta petugas yang ditugaskan hendaknya melakukan pendatan dan pendaftaran sesuai dengan data yang sebenarnya.
3. Wajib pajak restoran disarankan agar senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan tentang pembayaran pajak yang telah ditetapkan pada waktunya dan tidak menunda pembayarannya, karena partisipasi pembayaran pajak adalah wujud keikutsertaan dalam mendukung suksesnya pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.



4. Bagi penulis yang lebih lanjut, agar melanjutkan penelitian ini agar kedepannya menjadi lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2009). *Materi Perkuliahan*. Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska.
- Agustinus Sony. (2009). *Panduan Praktis Perpajakan*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Rinaka Cipta. Jakarta. 2003
- Buku Saku Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Teluk kuantan. (2008)
- Fakih. (2005). *Manajemen Strategi*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Guntur Alamsyah Hasibuan, *Analisis Pemungutan Pajak Restoran Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 2007.
- Husein, Umar, 2003, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
- Kansil, C.S.T. 2006. *Pengaturan undang-undang otonomi daerah*. PT. Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Marihot P, Siahaan. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
- Putera, Roni Ekha. 2009. *Optimalisasi Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bukit Tinggi*. Padang. Vol. 5. Hal. 85-98
- Resmi Siti. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba empat.
- Robert, L., Marthis, 2009, "human resource management" ( manajemen sumber daya manusia ), Jakarta; Salemba Empat..
- Setiawan, Agus dkk. 2006. *Perpajakan Umum*. PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta
- Singarimbun, 2005, "Metodologi Penelitian Survey" Jakarta; LP3ES.

Sumaryadi, I, Nyoman, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Citra Utama, Jakarta, 2005*

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Ikatan Penerbit Indonesia.  
2007

Tripono, Tedjo dan Udan, 2005, *Manajemen Strategi*, Rekayasa Salas, Bandung.

Widjaja, HAW., *Otonomi Daerah dan daerah otonom*, Raja Grafindo Persada,  
Jakarta, 2009.

Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 .

Zain Mohammad. (2007). *Menejemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba empat.